

Pilkada dan Isu Agama

FAISAL ZAINI DAHLAN

Dosen UIN Imam Bonjol Padang



Musuh demokrasi sejatinya bukanlah agama, tetapi berbagai praktik kecuranganlah yang justru menjadi ancaman serius terhadap masa depan demokrasi itu sendiri

proses. Karenanya, pilkada tidak selalu berkonotasi penggantian kepemimpinan semata, sehingga diwarnai kolusi dan bagi-bagi materi. Penilaian objektif dan pertimbangan kolektif lebih dikedepankan dari sekadar pertarungan politik praktis yang sarat tendensius.

Tidak kalah pentingnya harus disadari pula bahwa pilkada merupakan proses edukasi politik masyarakat pemilih. Dalam konteks ini, maka perilaku politik mengorbankan kejujuran dan menghalalkan segala cara demi meraup konstituen seperti money politic dan black campaign, adalah pembohongan publik yang tidak mendidik. Memilih pemimpin melalui praktik keji seperti itu tidak saja merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masa depan demokrasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap masa depan bangsa dan negara. Demi meraih keuntungan pribadi dan kelompok, lalu memberikan kekuasaan kepada individu yang tidak memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas, adalah kejahatan kemanusiaan dan peradaban.

Agama dan Politik
Kecenderungan untuk meng-

menjadi realitas sosiologis, tetapi juga idealitas teologis yang harus ditegakkan. Ini merupakan hal prinsipil, bukan sesederhana anggapan yang menyepelkannya sebagai isu murah, primitif, serta hanya laku "digoreng" karena murah meriah.

Menurut Abdul Mu'ti (2016) ada tiga argumen bagi kalangan ini sehingga sangat sulit memisahkan agama dalam percaturan politik. Pertama, agama dan politik merupakan satu kesatuan dari tuntunan kehidupan. Agama (al-din), kemasyarakatan (dunya), dan pemerintahan (daulah) merupakan kesatuan utuh. Karenanya, kalangan ini mewajibkan memilih pemimpin muslim. Menurut Mu'ti, paradigma seperti ini juga terdapat pada agama lain. Kedua, menjadikan agama sebagai pertimbangan utama dalam pemilihan jabatan publik merupakan ekspresi religiusitas. Mengamalkan ajaran agama sesuai keyakinan adalah hak konstitusional, sehingga negara tidak melarang penggunaan simbol dan identitas agama di ruang publik. Karenanya, merupakan hak asasi dan hak sipil warga negara jika memilih pemimpin yang seiman. Ketiga, memilih kepala daerah adalah soal favoritism, sehingga pemilih cenderung menjatuhkan pilihan berdasar personal proximity (kedekatan pribadi) maupun kesamaan-kesamaan dan preferensi termasuk agama.

Karena itu menurut Mu'ti, dalam konteks keragaman paradigma politik seperti itu perlu dibangun kesiapan untuk mampu bersikap dan berperilaku saling menghormati. Demokrasi meniscayakan perbedaan pilihan serta perbedaan pertimbangan menentukan pilihan, baik faktor agama maupun lainnya. Di Amerika sendiri sebagai model dan kampion demokrasi, menurut Mu'ti, ternyata faktor agama masih cukup dominan, apalagi di negeri yang dikenal religius dan menjadikan agama sebagai jati diri. Musuh demokrasi sejatinya bukanlah agama, tetapi berbagai praktik kecuranganlah yang justru menjadi ancaman serius terhadap masa depan demokrasi itu sendiri. Wallahua'lam. (*)

PEMILIHAN kepala daerah atau pilkada serentak di tahun 2018 ini, terhitung paling besar dari sebelumnya. Sebanyak 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten akan berpesta demokrasi. Dalam konteks Sumatera Barat, empat kota akan ikut berpartisipasi dalam ajang pemilihan wako dan wawako, yakni Padang, Padangpanjang, Pariaman, dan Sawahlunto.

Pada momen lima tahunan ini, salah satu yang dikhawatirkan banyak pihak adalah menguatnya isu SARA, terutama penyalahgunaan agama secara tidak sehat. Ini tentunya disepakati, meski tidak berarti argumentasi agama serta merta harus dilabeli sebagai anti demokrasi. Karena walau bagaimanapun, religiusitas justru menjadi bagian karakteristik dan ciri khas bangsa ini. Nilai-nilai agama menjadi ruh, norma, serta standar nilai dalam setiap aspek kehidupan. Kita memang bukan bangsa sekuler yang mencampakkan ajaran Tuhan dari ruang publik.

Hakikat Pilkada

Hiruk pikuk pesta demokrasi, seringkali menenggelamkan hakikat kontestasi itu sendiri. Substansi pilkada adalah memilih pemimpin publik sebagai kepala pemerintahan di suatu daerah. Urgensinya tidak hanya bagi pemerintah sebagai pihak penyelenggara kekuasaan, tetapi juga bagi rakyat sendiri sebagai objek. Karena itu mutlak diperlukan niat dan keinginan baik dari kedua pihak untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten dan mampu mengelola daerahnya menuju terwujudnya kesejahteraan bersama.

Jika hakekat kontestasi kepemimpinan ini telah menjadi kesadaran pribadi dan kolektif, maka ekkses negatif dan imbas inkonstruktif dari pesta politik akan tereliminir. Syahwat kekuasaan berorientasi kepentingan pribadi dan kelompok yang seringkali lebih dominan, akan kendur dengan tingginya tuntutan pertanggungjawaban publik. Hasil kompetisi yang unggul dan berkualitas pun akan lebih diutamakan dari

adap-hadapkan agama dan politik, biasanya muncul menjelang kontestasi kepemimpinan. Pengalaman pilkada yang diwarnai isu agama, dan kemudian menggelinding bahkan menjungkirbalikkan logika dan prediksi politik, dijadikan argumen bagi sebagian kalangan untuk menyudutkan agama sebagai biang kekacauan dalam berdemokrasi. Seakan proses demokrasi akan rusak jika agama diikutsertakan. Ada upaya making perception bahwa agama tidak punya hak apa-apa dalam urusan politik, sehingga keduanya harus diletakkan pada dua kutub yang berseberangan. Melibatkan agama dipandang sebagai penguatan sentimen politik identitas, yang dikhawatirkan tidak saja melemahkan kualitas berdemokrasi tetapi juga membangun polarisasi sosial yang mengancam keutuhan berbangsa.

Paradigma yang cenderung sekuler seperti itu, akan terus menjadi bagian sejarah perpolitikan. Namun perlu disadari bahwa di sisi lain terdapat pula paradigma berbeda, yang tidak memisahkan politik dari agama. Bagi kelompok ini, agama sebagai identitas politik tidak saja